

ANALISIS PERBANDINGAN PARTISIPASI MASYARAKAT KAWASAN PERUMAHAN DENGAN KAWASAN PERKAMPUNGAN DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Winfrit Kasse, Willy Tri Hardianto, Dewi Citra Larasati

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Tribhuwana Tungadewi

Email: winfrit_kasse@yahoo.co.id

Abstract : *Participatory development planning is an important issue of development that become demand of the people. This is related to the result of the evaluation that the approach of the development that is top-down rated less answer the basic issues and the needs of the community. The type of research is qualitative research with data collection technique by interview, observation and documentation, while the informants in this study is the Village Authorities and the Communities with Snowball sampling. The public participation of the housing area with the township area in the perspective of development in the Village of Landungsari, Sub-district of Dau, Malang Regency as follows: Planning of development through Musrenbangdes participation or level of community participation residential/housing area in development planning is still low, this is happening because in general people of the housing area have activities or work either as an entrepreneur, lecturer, teacher as well as Government Employee. While the level of participation of the people live in the township area in development planning through Musrenbangdes is larger both involved as an object or as a subject. Factors that affect the role of community participation in the housing area and the township/village area in the development planning in the Village of Landungsari: education, awareness, level of income.*

Keywords: *Participation, People/Community, Development*

Abstrak : Perencanaan pembangunan partisipatif merupakan isu penting pembangunan yang menjadi tuntutan masyarakat. Hal ini terkait dengan hasil evaluasi bahwa pendekatan pembangunan yang bersifat *top-down* dinilai kurang menjawab persoalan dasar dan kebutuhan masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, sedangkan informan dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa dan Masyarakat dengan penarikan sampel secara *snowbal sampling*. Peran serta masyarakat kawasan perumahan dengan perkampungan dalam perspektif pembangunan di Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang sebagai berikut: Perencanaan pembangunan melalui Musrenbangdes peran serta atau tingkat partisipasi masyarakat kawasan perumahan dalam perencanaan pembangunan masih rendah, hal ini terjadi dikarenakan pada umumnya masyarakat perumahan mempunyai pekerjaan sebagai pengusaha, dosen, guru, wiraswasta serta Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggal di perkampungan dalam perencanaan pembangunan melalui Musrenbangdes lebih besar baik terlibat sebagai obyek maupun sebagai subyek. Faktor-faktor yang mempengaruhi peran partisipasi masyarakat kawasan perumahan dengan perkampungan dalam perencanaan pembangunan di Desa Landungsari: pendidikan, kesadaran, tingkat pendapatan.

Kata kunci: *Partisipasi, Pembangunan*

Pendahuluan

Perencanaan pembangunan partisipatif merupakan isu penting pembangunan yang menjadi tuntutan masyarakat. Hal ini terkait dengan hasil evaluasi bahwa pendekatan pembangunan yang bersifat *top-down* dinilai kurang menjawab persoalan dasar dan kebutuhan masyarakat. Temuan tersebut melahirkan pemikiran tentang model pembangunan partisipatif yang menempatkan masyarakat sebagai subyek keseluruhan proses kegiatan. Perencanaan partisipatif merupakan usaha yang sistematis, dimana

masyarakat dapat terlibat aktif memecahkan masalah yang dihadapi agar mencapai kondisi berdasarkan kebutuhannya.

Pembangunan partisipatif merupakan pendekatan pembangunan yang sesuai dengan hakikat Otonomi Daerah yang meletakkan landasan pembangunan yang tumbuh berkembang dari masyarakat, diselenggarakan secara sadar dan mandiri oleh masyarakat dan hasilnya dinikmati oleh seluruh masyarakat (Sumaryadi, 2005:87). Melalui program-program pembangunan partisipatif tersebut diharapkan semua elemen masyarakat dapat secara bersama-sama berpartisipasi dengan cara mencurahkan pemikiran dan sumberdaya yang dimiliki guna memenuhi kebutuhannya sendiri. Theresia, et all (2014:196) mengartikan partisipasi sebagai tindakan untuk “mengambil bagian” yaitu kegiatan atau pernyataan untuk mengambil bagian dari kegiatan dengan maksud memperoleh manfaat. Sedang di dalam kamus sosiologi disebutkan bahwa, partisipasi merupakan keikutsertaan seseorang di dalam kelompok sosial untuk mengambil bagian dari kegiatan masyarakatnya, di luar pekerjaan atau profesinya sendiri.

Dasar hukum keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, meletakkan partisipasi masyarakat sebagai elemen penting untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, menciptakan rasa memiliki masyarakat dalam pengelolaan pemerintahan daerah, menjamin adanya transparansi, akuntabilitas, dan kepentingan umum, perumusan program dan pelayanan umum yang memenuhi aspirasi masyarakat. Desentralisasi dalam hal ini juga diminati karena didalamnya terkandung semangat demokrasi untuk mendekatkan partisipasi masyarakat dalam menjalankan sebuah pembangunan pada perkembangan yang lebih jauh, desentralisasi lalu menjadi semangat utama bagi Negara-negara yang menyepakati demokrasi sebagai landasan gerak utamanya. Kesamaan orientasi desentralisasi dan demokratisasi inilah yang membuat sebuah Pemerintahan di masa kini tidak lagi bisa memerintah secara sentralistik. Terdapat kesadaran baru di kalangan para penyelenggara Pemerintahan bahwa masyarakat merupakan pilar utama yang harus dilibatkan dalam berbagai proyek pembangunan.

Sjafrizal (2015:24) Perencanaan pada dasarnya merupakan cara, teknik atau metode untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara tepat, terarah, dan efisien sesuai dengan sumber daya yang tersedia. Dengan demikian, secara umum perencanaan pembangunan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan pembangunan secara tepat, terarah, dan efisien sesuai dengan kondisi Negara atau daerah bersangkutan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, juga melambangkan musrenbang di semua tingkatan Pemerintahan dan perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan. Di dalamnya juga terkandung pentingnya sinkronisasi lima pendekatan perencanaan yaitu, pendekatan politik, partisipatif, teknokratis, *bottom-up dan top-down* dalam perencanaan pembangunan Daerah. Perangkat Daerah dan musyawarah perencanaan kota. Musrenbangkel maupun musrenbangcam mengutamakan partisipasi dan peran serta warga daerah dalam proses perencanaan dan penetapan suatu rancangan pembangunan di Daerah mereka. Dengan adanya musyawarah-musyawarah yang melibatkan partisipasi aktif warga daerah tersebut diharapkan selain pembangunan yang akan dilaksanakan benar-banar merupakan aspirasi warga dan aparat daerah, selain itu masyarakat juga mendapat pendidikan politik di tingkat dasar dan lebih diberdayakan dalam artian ikut berpartisipasi aktif tidak hanya sebagai pelaksana saja.

Musyawarah penentuan arah pembangunan tersebut bisa dikatakan sangat penting bagi warga daerah terkait. Tetapi fakta di lapangan partisipasi warga daerah sangat kecil. Faktor kurangnya sosialisasi dan keacuhan dari warga adalah dua hal utama yang menyebabkan hal tersebut. Untuk melaksanakan

pembangunan daerah secara tepat, efektif dan efisien, dibutuhkan kredibilitas sumberdaya manusia masyarakat itu sendiri, dan kualitas aparatur pemerintahan.

Musrenbang adalah forum publik perencanaan (program) yang diselenggarakan oleh lembaga publik yaitu Pemerintah Desa bekerja sama dengan warga dan para pemangku kepentingan. Penyelenggaraan musrenbang merupakan salah satu tugas Pemerintah Desa untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Pembangunan tidak akan bergerak maju apabila salah satu saja dari tiga komponen tata Pemerintahan (pemerintah, masyarakat, swasta) tidak berperan atau berfungsi. Karena itu, musrenbang juga merupakan forum pendidikan warga agar menjadi bagian aktif dari tata Pemerintahan dan pembangunan. Inti dari musrenbang adalah partisipasi aktif warga.

Dalam realitasnya, tidak semua anggota masyarakat ikut berpartisipasi, dengan berbagai macam alasan. Hal ini dikarenakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya masyarakat tidak ikut berperan serta jika hasil peran sertanya tidak berpengaruh pada hasil akhir, masyarakat tidak mau berperan serta dalam kegiatan yang tidak menarik minat mereka atau aktifitas yang tidak berpengaruh langsung yang dapat mereka rasakan, tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah, kurangnya sosialisasi dari pemerintah, masyarakat tidak mau ikut terlibat jikalau fasilitas dari pemerintah kurang memadai, disini diperlukan upaya untuk meyakinkan masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam perencanaan pembangunan, yaitu adanya komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat atau sebaliknya. Keadaan seperti ini akan merubah sikap serta tindakan masyarakat yang selanjutnya menjadi dukungan untuk berpartisipasi.

Dengan demikian kita sadari bersama bahwa tujuan utama dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan adalah demi tercapainya kesejahteraan masyarakat sehingga dalam pelaksanaan pembangunan, penyaluran aspirasi masyarakat dengan segenap *stakeholder* harus jelas bagaimana bentuk serta mekanismenya, karena semakin tinggi partisipasi masyarakat maka akan semakin meningkatkan kinerja pembangunannya. Sehingga peran serta masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan karena pada akhirnya hasil pembangunan adalah untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana partisipasi masyarakat Desa Landungsari dalam perencanaan pembangunan?, Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi masyarakat Desa Landungsari dalam perencanaan pembangunan?

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu: Untuk mendeskripsikan dan menganalisis partisipasi masyarakat Desa Landungsari dalam perencanaan pembangunan serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat Desa Landungsari dalam perencanaan pembangunan.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan kualitatif, dengan mengambil lokasi penelitian di Desa Landungsari. Adapun yang menjadi alasan peneliti mengambil lokasi penelitian ini yaitu dikarenakan peneliti ingin mengetahui sejauh mana peran masyarakat perumahan dan masyarakat perkampungan dalam perencanaan pembangunan. Pada penelitian ini peneliti memperoleh data dari data sekunder dan data primer dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Pengambilan Sampel pada penelitian ini dilakukan dengan penarikan sampel secara *Snowbal sampling*, dan yang menjadi instrument pada penelitian ini yaitu peneliti sendiri, daftar pertanyaan, camera hand

phone, dan alat tulis. Pemeriksaan keabsahan data menggunakan triangulasi teknik, yaitu melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, kemudian data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan Miles and Huberman (dalam Sugiono 2011:247) yaitu dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Partisipasi Masyarakat Kawasan Perumahan dengan Perkampungan dalam Perencanaan Pembangunan.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan karena tanpa partisipasi masyarakat dalam pembangunan maka pembangunan tersebut tidak akan berjalan dengan baik, oleh karena itu dalam kegiatan pembangunan harus melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif baik terlibat sebagai obyek maupun sebagai subyek dalam pembangunan tersebut. Pada perencanaan pembangunan di Desa Landungsari melalui MusrenbangDes merupakan suatu forum bagi masyarakat Desa Landungsari untuk dapat menentukan arah pembangunan Desa tersebut karena tanpa adanya perencanaan maka sangat sulit untuk menentukan arah pembangunan Desa tersebut dan melalui perencanaan pembangunan ini masyarakat dapat menyampaikan usulan-usulannya untuk pembangunan Desa pada tahun berikutnya.

Di Desa Landungsari masyarakatnya terbagi dalam dua kawasan yaitu kawasan perumahan dengan kawasan perkampungan, dari dua kawasan masyarakat tersebut tingkat partisipasinya dalam perencanaan pembangunan berbeda, hal tersebut dikarenakan kedua kawasan tersebut mempunyai karakteristik yang berbeda seperti sikap, pengetahuan, perilaku dan kesadaran untuk berperan aktif dalam setiap kegiatan perencanaan pembangunan. perbedaan karakteristik antara masyarakat yang tinggal di kawasan perumahan dan kawasan perkampungan, hal ini sangat mempengaruhi peran dari masyarakat tersebut untuk berpartisipasi dalam setiap proses pembangunan di Desa Landungsari, dimana masyarakat yang bertempat tinggal di kawasan perumahan pada umumnya adalah masyarakat yang sudah mapan dan mandiri dalam melakukan suatu pekerjaan sehingga lebih cenderung bersifat individual dan juga interaksi-interaksi yang terjadi di masyarakat yang berada di perumahan lebih cenderung pada faktor kepentingan pribadi dari pada kepentingan umum, sedangkan masyarakat yang tinggal di kawasan perkampungan kehidupannya sederhana, religius, menjunjung tinggi norma-norma yang berlaku di daerahnya dan interaksi-interaksi antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya lebih demokratis, serta dalam melakukan suatu pekerjaan atau pembangunan di Desanya selalu mengedepankan bekerja secara bergotong-royong. Sehubungan dengan adanya perbedaan ini maka sangat penting untuk melihat sejauh mana peran masyarakat yang tinggal di kawasan perumahan dan masyarakat yang tinggal di kawasan perkampungan dalam perencanaan pembangunan di Desa Landungsari, baik keterlibatannya sebagai obyek maupun sebagai subyek pembangunan.

Partisipasi Masyarakat Kawasan Perumahan dalam Perencanaan Pembangunan.

Pada perencanaan pembangunan di Desa Landungsari masyarakat kawasan perumahan selalu dilibatkan namun partisipasi dari masyarakat yang tinggal di kawasan perumahan masih rendah. Rendahnya partisipasi masyarakat yang tinggal di kawasan perumahan dalam perencanaan pembangunan di Desa Landungsari terjadi dikarenakan pada umumnya masyarakat perumahan mempunyai kegiatan atau pekerja baik sebagai Pengusaha, Dosen, Guru maupun sebagai Wiraswasta serta Pegawai Negeri

Sipil, yang menyebabkan ketersediaan waktu untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan hampir tidak ada, karena disibukkan oleh pekerjaan yang ditekuninya, namun walaupun demikian partisipasinya dalam bentuk swadaya berupa dana cukup besar, artinya masyarakat yang tinggal di kawasan perumahan partisipasinya dalam pembangunan di Desa hanya sebatas sebagai obyek dari pembangunan dan belum sesuai dengan konsep pembangunan partisipatif, dimana dalam konsep pembangunan partisipatif menitik beratkan masyarakat dalam dua hal yaitu sebagai obyek dan sebagai subyek pembangunan. Sehubungan dengan hal ini maka sangatlah penting bagi Pemerintah Desa dalam mensosialisasikan dan melakukan pendekatan secara khusus kepada masyarakat yang tinggal di kawasan perumahan bahwa keterlibatannya sebagai subyek dalam perencanaan pembangunan sangatlah penting, dalam artian kehadiran atau partisipasi secara langsung pada perencanaan pembangunan melalui MusrenbangDes untuk mengaktualisasikan setiap pengetahuan yang dimiliki berupa pikiran dan usulan-usulan program dalam rangka untuk pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Landungsari pada umumnya.

Partisipasi Masyarakat Kawasan Perkampungan dalam Perencanaan Pembangunan.

Pada perencanaan pembangunan di Desa Landungsari Pemerintah Desa selalu melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif untuk mengakomodasikan kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan dimana perencanaan pembangunan ini merupakan suatu pedoman awal bagi Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa, dan menjadi satu kesatuan dengan perencanaan pembangunan Kabupaten Malang. Mengingat akan pentingnya perencanaan pembangunan ini maka dalam penyelenggaraannya harus dilaksanakan secara demokratis serta bersifat partisipatif dengan cara melibatkan peran aktif dari semua *stakeholder* atau pemangku kepentingan yang ada di Desa tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional perlunya melakukan suatu perencanaan pembangunan dengan menerapkan sistem perencanaan yang partisipatif guna meningkatkan aspirasi masyarakat dalam perencanaan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka dalam perencanaan pembangunan pemerintah Desa Landungsari selalu melibatkan partisipasi masyarakat baik masyarakat yang tinggal di kawasan perumahan maupun masyarakat yang tinggal di kawasan perkampungan, namun dalam pelaksanaannya partisipasi masyarakat yang tinggal di kawasan perkampungan lebih dominan atau lebih besar.

Dari uraian pernyataan informan dan hasil observasi dari peneliti bahwa kalau partisipasi masyarakat yang tinggal di kawasan perkampungan partisipasinya dalam perencanaan pembangunan di Desa Landungsari melalui musyawarah perencanaan pembangunan di Desa lebih besar dibanding masyarakat yang tinggal di kawasan perumahan hal ini menunjukkan bahwa yang lebih berperan dalam musyawarah perencanaan pembangunan adalah masyarakat yang berada di kawasan perkampungan.

Pada musyawarah perencanaan pembangunan ini masyarakat Desa Landungsari digunakan sebagai alat untuk memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, karena masyarakatlah yang tahu betul apa saja yang menjadi kebutuhan mereka untuk diprioritaskan dan dilaksanakan, jadi tanpa kehadirannya maka akan sangat sulit bagi Pemerintah Desa dalam menentukan arah pembangunan Desa tersebut sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat, sehubungan dengan hal tersebut maka ketika ada perencanaan pembangunan melalui musyawarah perencanaan pembangunan di Desa masyarakat disediakan ruang untuk menyampaikan pikiran atau pendapat berupa usulan-usulan

yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing masyarakat perdesun dan juga masyarakat diberi kesempatan untuk menentukan skala prioritas usulan mana yang akan didahulukan untuk dilaksanakan pada pembangunan periode berikutnya. Untuk itu perencanaan pembangunan di Desa Landungsari masyarakat kawasan perkampungan selalu dilibatkan dan dalam musyawarah perencanaan pembangunan ini masyarakat perkampungan selalu terlibat sebagai obyek yaitu dengan cara ikut serta dalam penyelenggaraan MusrenbangDes, sedangkan keterlibatannya sebagai subyek dilihat dari keterlibatan masyarakat perkampungan sebagai panitia penyelenggara, dan masyarakat yang tidak terlibat sebagai panitia penyelenggara mengambil peran dalam menyampaikan usulan-usulan serta ikut mengambil bagian dalam penentuan skala prioritas pembangunan untuk dilaksanakan pada priode berikutnya, dengan demikian dapat dikatakan masyarakat yang tinggal di kawasan perkampungan sudah terlibat sebagai aktor utama pada perencanaan pembangunan di Desa Landungsari.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Kawasan Perumahan dengan Perkampungan dalam Perencanaan Pembangunan.

Tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat di dalam konteks perencanaan pembangunan di suatu Desa sangat di tentukan oleh tiga faktor yaitu pendidikan, kesadaran dan tingkat pendapatan, terutama faktor kesadaran dari setiap individu masyarakat sangat menentukan tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, karena walaupun mempunyai pendidikan yang tinggi tapi tidak mempunyai kesadaran maka keinginan untuk peran serta dalam kegiatan perencanaan pembangunan akan rendah.

1. Faktor pendidikan masyarakat.

Faktor pendidikan merupakan suatu indikator yang sangat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa, karena tingkat pendidikan yang dimiliki oleh setiap individu masyarakat dapat merubah pola pikir sikap dan cara pandang dari setiap individu masyarakat, selain itu juga masyarakat yang mempunyai pendidikan tinggi jika ikut dalam perencanaan pembangunan akan sangat berkontribusi lewat pemberian ide-ide atau pikiran-pikiran yang cemerlang guna menentukan arah pembangunan di Desa tersebut.

Berdasarkan observasi peneliti dan data administrasi Desa Landungsari yang peneliti peroleh mayoritas masyarakat Desa Landungsari berpendidikan tinggi, terutama masyarakat yang tinggal di kawasan perumahan, namun partisipasi masyarakat yang tinggal di kawasan perumahan masih rendah, sedangkan partisipasi masyarakat yang tinggal di kawasan perkampungan lebih besar. Adapun hal yang menjadi faktor lain penyebab rendahnya partisipasi masyarakat yang tinggal di kawsan perumahan dalam perencanaan pembangunan yaitu dikarenakan masyarakat yang tinggal dikawasan perumahan cenderung apatis untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan, selain itu juga masyarakat yang tinggal di kawasan perumahan lebih mengutamakan pekerjaan mereka sehingga tidak ikut berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan.

Berdasarkan hal tersebut diatas bahwa partisipasi masyarakat yang tinggal di kawasan perumahan lebih rendah dibandingkan dengan partisipasi masyarakat yang tinggal di kawasan perkampungan, namun jika dilihat dari tingkat pendidikannya mayoritas penduduk yang tinggal di kawasan perumahan lebih tinggi, jika dilihat hal ini maka Pemerintah Desa harus melakukan pendekatan dan mensosialisasikan kepada warga yang tinggal di kawasan perumahan bahwa kontribusinya untuk ikut serta dalam pembangunan sangat lah penting.

2 Faktor Kesadaran Masyarakat

Selain faktor pendidikan yang dimiliki oleh seseorang, tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa. Faktor kesadaran dari masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses pembangunan merupakan suatu hal yang sangat diharapkan dan sangat penting untuk diperhatikan, karena walaupun tingkat pendidikan yang dimiliki oleh setiap individu masyarakat tinggi namun tidak didukung oleh kesadaran yang tumbuh dari masyarakat itu maka sangat mempengaruhi keinginan dari setiap individu masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan.

Pada perencanaan pembangunan di Desa Landungsari kesadaran dari masyarakat untuk ikut serta dalam mengambil bagian pada kegiatan perencanaan pembangunan sudah besar terutama masyarakat yang tinggal di kawasan perkampungan, namun beda halnya kesadaran masyarakat yang tinggal dalam kawasan perumahan untuk terlibat atau berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan Desa Landungsari masih rendah. Besarnya kesadaran masyarakat yang tinggal di kawasan perkampungan untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan, hal ini ditandai dengan keterlibatan masyarakat dalam setiap proses perencanaan pembangunan di Desa Landungsari yaitu masyarakat berperan sebagai obyek maupun sebagai subyek dari setiap proses pembangunan. Keterlibatan masyarakat sebagai obyek dalam setiap proses pembangunan yaitu di tandai dengan kehadiran masyarakat sangat besar, sedangkan keterlibatan masyarakat sebagai subyek yaitu pada setiap proses perencanaan pembangunan terlibat sebagai panitia penyelenggara MusrenbangDes dan juga masyarakat yang tidak terlibat sebagai panitia penyelenggara MusrenbangDes ikut hadir dalam kegiatan tersebut dan memberikan kontribusi besar berupa ide-ide atau pikiran serta mengambil bagian dalam menentukan skala prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada periode berikutnya. Dengan melihat hal ini maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran masyarakat kawasan perkampungan lebih besar dibanding kesadaran masyarakat yang tinggal di kawasan perumahan.

3 Faktor Pendapatan Masyarakat

Pendapatan merupakan suatu bentuk penghasilan yang diperoleh setiap individu masyarakat atas pekerjaan atau usaha yang ditekuninya, semakin tinggi jabatan dan atau semakin besar usaha yang ditekuni oleh seseorang maka pendapatan atau penghasilannya pun semakin besar. Pendapatan atau penghasilan ini jika dipandang dari status sosial masyarakat maka seseorang yang pendapatan atau penghasilannya besar status sosialnya semakin tinggi, sebab pada saat ini seseorang mencari pekerjaan dan melakukan suatu usaha bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan ekonominya akan tetapi juga berkaitan erat dengan derajat kehidupan atau untuk meningkatkan status sosialnya, semakin besar pendapatan maka semakin tinggi derajat kehidupan atau status sosial dari seseorang. Pendapatan atau penghasilan seseorang jika dibawah pada rana pembangunan, lebih khususnya partisipasi masyarakat dalam bentuk swadaya sumbangan berupa dana, masyarakat yang pendapatannya besar tentunya partisipasinya dalam pembangunan khususnya berupa dana lebih besar dibanding masyarakat yang pendapatannya rendah.

Berdasarkan penyajian data di muka bahwa masyarakat yang tinggal di kawasan perumahan adalah sebagai pekerja dan ada juga yang melakukan usaha atau berbisnis, sedangkan masyarakat yang tinggal di kawasan perkampungan sebagian berkerja sebagai buruh tani, bangunan PNS dan berwiraswasta. Dengan adanya perbedaan pekerjaan dan penghasilan ini maka tingkat kesibukan juga akan berbeda, yang pada akhirnya partisipasinya pun dalam perencanaan pembangunan akan berbeda-

beda. Hal tersebut sangat nampak ketika pada musyawarah perencanaan pembangunan di Desa Landungsari tingkat kehadiran atau partisipasi masyarakat yang tinggal di kawasan perkampungan lebih besar dibandingkan dengan masyarakat yang tinggal di kawasan perumahan, namun sebaliknya partisipasi masyarakat yang tinggal di kawasan perumahan lebih nampak dan atau lebih besar partisipasinya dalam bentuk swadaya berupa sumbangan dana, hal ini menunjukkan pendapatan yang dimiliki oleh setiap individu masyarakat sangat berpengaruh pada partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilaksanakan oleh peneliti tentang Analisis Perbandingan Partisipasi masyarakat Kawasan Perumahan dengan Kawasan Perkampungan dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat di kawasan perumahan dalam perencanaan pembangunan di Desa Landungsari masih rendah. Sedangkan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggal di kawasan perkampungan dalam perencanaan pembangunan melalui musrenbangDes lebih besar, hal tersebut dilihat dari tiga faktor yaitu pendidikan, kesadaran masyarakat serta pendapatan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Sjafrizal. 2015. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Penerbit PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Penerbit Alfabeta, cv. Bandung.
- Sumaryadi, I Nyoman. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Penerbit Citra Utama. Jakarta
- Theresia, Et All. 2014. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Penerbit Alfabeta. Bandung.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.